



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ASRADI**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **678796**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 465 m2/150 m2 di KAB / KOTA TANA TORAJA, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 404 m2/20 m2 di KAB / KOTA TANA TORAJA, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 172 m2 di KAB / KOTA TANA TORAJA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 19950 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 19950 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 4.000.000

1. MOTOR, HONDA NC12A1CF A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 24.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.311.533



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.780.311.533
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.780.311.533

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.